



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN
BANDARKEDUNG MULYO

Jl. Dr. Soetomo Nomor 138 (0321) 711973 Bandarkedungmulyo

KEPUTUSAN CAMAT BANDARKEDUNG MULYO
KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 188/08/415.49/2024

TENTANG

PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024 - 2026

CAMAT BANDARKEDUNG MULYO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, perlu disusun Review Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bandarkedungmulyo;
- b. bahwa Review Rencana Strategi Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang Tahun 2024 - 2026 menyesuaikan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b pertimbangan menimbang ini, maka perlu menetapkan Review Rencana Strategis Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang tahun 2024 - 2026 dengan Keputusan Camat Bandarkedungmulyo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 272-7/2016);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 45/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 15/D);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Review Rencana Strategis Kecamatan Bandarkedungmulyo Tahun 2024 – 2026;
- KEDUA : Review Rencana Strategis Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 adalah dokumen perencanaan periode 3 tahun yang akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang setiap tahun selama periode Renstra berjalan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jombang

Pada Tanggal 12 Januari 2024



CAMAT BANDARKEDUNG MULYO

HARIYANTO, S.Sos., M.Si

BERITA ACARA
HASIL REVIU SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026
KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO KABUPATEN JOMBANG

Pada hari ini, Selasa tanggal delapan bulan Januari tahun 2024, kami Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, telah melaksanakan Reviu Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, dengan rincian hasil sebagai berikut :

I. TUJUAN

a. Uraian Tujuan Sebelum Reviu

TUJUAN
1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Tujuan

Tidak terdapat perubahan tujuan, tujuan telah sesuai dengan Perubahan Renstra 2024-2026 dan Perubahan RPD 2024-2026. Tujuan OPD menunjang capaian sasaran. Rekomendasi Tim Reviu tentang tujuan : 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

c. Uraian Tujuan Sesudah Reviu

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

II. INDIKATOR TUJUAN

a. Uraian Indikator Tujuan, Formulasi Sebelum Reviu

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI INDIKATOR TUJUAN
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Bandarkedungmulyo	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Bandarkedungmulyo Tahun n
	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten tahun n

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Indikator Tujuan dan Formulasi Tujuan

SEBELUM REVIU				REKOMENDASI TIM REVIU	SESUDAH REVIU			
NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI INDIKATOR TUJUAN		NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI INDIKATOR TUJUAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Bandarkedungmulyo	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Bandarkedungmulyo Tahun n	Tidak terdapat perubahan indikator tujuan, tujuan telah sesuai dengan Perubahan Renstra 2024-2026 dan	1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Bandarkedungmulyo	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Bandarkedungmulyo Tahun n

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten tahun n	Perubahan RPD 2024-2026. Indikator tujuan OPD menunjang capaian indikator sasaran (IKD)	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten tahun n
---	---	--	---	---

III.SASARAN

a. Uraian Sasaran Sebelum Reviu

SASARAN
1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Sasaran

Tidak terdapat perubahan sasaran, sasaran telah sesuai dengan Perubahan Renstra 2024-2026 dan Perubahan RPD 2024-2026. Rekomendasi Tim Reviu tentang sasaran :
1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

1. Uraian Sasaran Sesudah Reviu

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

IV. INDIKATOR SASARAN

a. Uraian Indikator Sasaran, Formulasi Sebelum reviu

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Bandarkedungmulyo	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Bandarkedungmulyo tahun n
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bandarkedungmulyo	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bandarkedungmulyo tahun n

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Indikator Sasaran

SEBELUM REVIU			REKOMENDASI TIM REVIU	SESUDAH REVIU		
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Bandarkedungmulyo	Tidak ada perubahan indikator sasaran, sasaran telah sesuai dengan Perubahan Renstra tahun 2024-2026 dan Perubahan RPD Tahun 2024-2026	1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Bandarkedungmulyo
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bandarkedungmulyo		2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bandarkedungmulyo

V. PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM

a. Uraian Program Sebelum Reviu

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Program

SEBELUM REVIU			SESUDAH REVIU		
NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM		NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	REKOMENDASI TIM REVIU	1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Tidak ada perubahan program, program telah sesuai dengan Perubahan Renstra tahun 2024-2026 dan Perubahan RPD Tahun 2024-2026 serta sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
--	--

VI. INDIKATOR PROGRAM

a. Uraian Indikator Program dan formulasi Sebelum Reviu

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM
Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Jumlah capaian kinerja seluruh PNS Kec. Bandarkedungmulyo -----x100% jumlah pegawai PNS Kec. Bandarkedungmulyo
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	Jumlah pelaksanaan kegiatan PHBN/PHBA dan Monev sosial budaya -----x100% Jumlah kegiatan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang direncanakan
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti -----x100% Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Nilai PATEN Kecamatan	Nilai PATEN Kecamatan tahun n
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	Jumlah Desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif -----x100% Jumlah Desa
	Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu	Jumlah laporan realisasi APBDesa tepat waktu -----x100% Jumlah Desa

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi terkait	Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti PD / Instansi terkait -----x100% Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke PD/Instansi terkait
--	--	---

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Indikator Program dan Formulasi Program

SEBELUM REVIU				REKOMENDASI TIM REVIU	SESUDAH REVIU			
NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM		NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Jumlah capaian kinerja seluruh PNS Kec. Bandarkedungmulyo -----x100% jumlah pegawai PNS Kec. Bandarkedungmulyo	Tidak ada perubahan indikator program, indikator sudah sesuai dengan Perubahan Renstra Tahun 2024-2026 dan Perubahan RPD Tahun 2024-2026 serta sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi,	1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Jumlah capaian kinerja seluruh PNS Kec. Bandarkedungmulyo -----x100% jumlah pegawai PNS Kec. Bandarkedungmulyo
2.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	Jumlah pelaksanaan kegiatan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya -----x100% Jumlah kegiatan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang direncanakan Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti -----x100%		2.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	Jumlah pelaksanaan kegiatan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya -----x100% Jumlah kegiatan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang direncanakan Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti -----x100%

			Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam
3.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai PATEN Kecamatan	Nilai PATEN Kecamatan tahun n		3.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai PATEN Kecamatan Nilai PATEN Kecamatan tahun n
4.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	Jumlah Desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif -----x100% Jumlah Desa		4.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif -----x100% Jumlah Desa
5.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu	Jumlah laporan realisasi APBDesa tepat waktu -----x100% Jumlah Desa		5.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu -----x100% Jumlah Desa
6.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti PD / Instansi terkait	Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti PD / Instansi terkait -----x100% Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan		6.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti PD / Instansi terkait -----x100% Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan

			Trantibum yang dikoordinasikan ke PD/Instansi terkait				Trantibum yang dikoordinasikan ke PD/Instansi terkait
--	--	--	---	--	--	--	---

VII. KEGIATAN

a. Uraian Kegiatan Sebelum Reviu

PROGRAM	KEGIATAN
Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Kegiatan

SEBELUM REVIU			REKOMENDASI TIM REVIU	SESUDAH REVIU		
NO	PROGRAM	KEGIATAN		NO	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah				Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah

	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
3. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

4.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		4.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
5.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		5.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tidak ada perubahan kegiatan, kegiatan telah sesuai dengan Perubahan Renstra tahun 2024-2026 dan Perubahan RPD Tahun 2024-2026 serta sesuai dengan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan	6. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
---	---	---	---	---

		dan Keuangan Daerah	
--	--	---------------------	--

VIII. INDIKATOR KEGIATAN

a. Uraian Indikator Kegiatan dan Formulasi Sebelum Reviu

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan}} \times 100\%$
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	$\frac{\text{Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu}}{\text{Pencairan gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan}} \times 100\%$
	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	$\frac{\text{Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan}}{\text{Jumlah Laporan keuangan yang ditargetkan}} \times 100\%$
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Bandarkedungmulyo	$\frac{\text{Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian}}{\text{Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian yang ditargetkan}} \times 100\%$
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	$\frac{\text{Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran}}{\text{Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran}} \times 100\%$

Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan Jumlah realisasi Pengadaan sarana dan prasarana -----x100% Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang ditargetkan
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah -----x100% Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik -----x100% Jumlah barang milik daerah yang dipelihara
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kegiatan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	Jumlah Laporan kegiatan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya tahun n
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam tahun n
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	Jumlah pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar -----x100% Jumlah pelayanan terpadu (PATEN)

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes tahun n Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina tahun n
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap tahun n
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan PD / instansi terkait -----x100% Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Indikator Kegiatan dan Formulasi Indikator Kegiatan

NO	SEBELUM REVIU			REKOMENDASI TIM REVIU	NO	SESUDAH REVIU		
	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran		1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran

	Perangkat Daerah	evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan -----x100% Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan			Perangkat Daerah	evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan -----x100% Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu -----x100% Pencairan gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu ----- x100% Pencairan gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan -----x100% Jumlah Laporan keuangan yang ditargetkan				Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan ----- x100% Jumlah Laporan keuangan yang ditargetkan

3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Bandarkedungmulyo	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian -----x100% Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian yang ditargetkan		3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Bandarkedungmulyo	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian -----x100% Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian yang ditargetkan
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran -----x100 Pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan		4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran -----x100% Pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan
5.	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana -----x100% Jumlah pengadaan sarana dan		5.	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana -----x100% Jumlah pengadaan sarana dan

6.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	prasarana yang ditargetkan Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah -----x100% Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan		6.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	prasarana yang ditargetkan Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah ----- x100% Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik -----x100% Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik ----- x100% Jumlah barang milik daerah yang dipelihara
6.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah Laporan Kegiatan PHBN/PHBA dan money sosial	Jumlah Laporan kegiatan PHBN/PHBA dan money		6.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah Laporan Kegiatan PHBN/PHBA dan money sosial	Jumlah Laporan kegiatan PHBN/PHBA dan money

	Penugasan Kepala Daerah	budaya yang dilaksanakan	sosial budaya tahun n			Penugasan Kepala Daerah	budaya yang dilaksanakan	sosial budaya tahun n
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam tahun n				Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam tahun n
7.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	Jumlah pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar -----x100% Jumlah pelayanan terpadu (PATEN)		7.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	Jumlah pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar ----- x100% Jumlah pelayanan terpadu (PATEN)
8.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes tahun n		8.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes tahun n

		Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina tahun n				Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina tahun n
9.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDesa dengan lengkap	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDesa dengan lengkap tahun n		9.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDesa dengan lengkap	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDesa dengan lengkap tahun n

11	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan PD / instansi terkait -----x100% Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Tidak ada perubahan Indikator kegiatan, indikator kegiatan telah sesuai dengan Perubahan Renstra tahun 2024-2026 dan Perubahan RPD Tahun 2024-2026 serta sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan	11	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan PD / instansi terkait -----x100% Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
----	---	---	---	--	----	---	---	---

				Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

IX. INDIKATOR SUB KEGIATAN

a. Uraian Indikator Sub Kegiatan Sebelum Reviu

SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa

Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Indikator dan Formulasi Sub Kegiatan

NO	SEBELUM REVIU			REKOMENDASI TIM REVIU	NO	SESUDAH REVIU		
	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN			SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun tahun n		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun tahun n
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun tahun n		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun tahun n
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN tahun n		3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN tahun n
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SKPD yang tersusun tahun n Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD tahun n	5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SKPD yang tersusun tahun n Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD tahun n
6	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan tahun n	6	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan tahun n
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan tahun n	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan tahun n
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tahun n	8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tahun n
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan tahun n	9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan tahun n
10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan tahun n	10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan tahun n
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan

			Perundang-Undangan yang Disediakan tahun n				Perundang-Undangan yang Disediakan tahun n
12	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tahun n		12	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tahun n
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan tahun n		13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan tahun n
14	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tahun n		14	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tahun n
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tahun n		15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tahun n
16	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya tahun n		16	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya tahun n

17	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi tahun n		17	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi tahun n
18	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi tahun n		18	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi tahun n
19	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa tahun n		19	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa tahun n
20	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan tahun n		20	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan tahun n
21	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n		21	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n

22	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n		22	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n
23	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa tahun n		23	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa tahun n
24	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa tahun n		24	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa tahun n

25	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun n	Tidak ada perubahan Sub kegiatan dan indikatornya, Sub Kegiatan dan indikatornya telah sesuai dengan Perubahan Renstra tahun 2024-2026 dan Perubahan RPD Tahun 2024-2026 serta sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi,	25	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun n
----	--	---	---	---	----	--	---	---

				Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
--	--	--	--	--	--	--	--

Demikian Hasil Reviu Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Strategis (Renstra) oleh Tim Penerapan SAKIP Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan selanjutnya.

Komentar Pejabat:

Berdasarkan hasil reviu dari Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bandarkedungmulyo akan dilaksanakan reviu terhadap tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bandarkedungmulyo. Reviu didasarkan pada:

1. Perubahan RPD Kab. Jombang Tahun 2024-2026 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bandarkedungmulyo Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan **Kepmendagri Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.**
2. Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan harus sesuai dengan **Perbup No. 45 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Perbup No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.**
3. Penetapan Indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan harus mampu menunjang kinerja atasan secara linear dari staf-eselon III (button up).

4. Penetapan indikator tujuan dan sasaran OPD harus selaras dan menunjang tercapainya tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Jombang
5. Penetapan Indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan harus orientasi hasil (outcome)
6. Penetapan Indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan harus memenuhi kriteria SMART

Tanggal, 12 Januari 2024
CAMAT BANDARKEDUNG MULYO



HARYANTO, S.Sos., M.Si
NIP. 196809251990031003

